

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan memiliki kaitan dengan yang dilakukan peneliti kemudian menjelaskan apa yang menjadi perbedaan dan permasalahan:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maria Ulfa, beliau merupakan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Judul skripsi yang diangkatnya ialah: “PERAN KIAI DALAM KEHIDUPAN POLITIK PENELITIAN DI DESA SUMUR KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL”. Di penelitian beliau Kiai merupakan salah satu figur atau tokoh agama Islam yang membawa peran dalam bidang sosial keagamaan dan politik terutama pada masyarakat desa. Secara teologis kiai dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat alanbiya*). Desa Sumur kecamatan Brangsong kabupaten Kendal adalah salah satu desa yang membawa kontribusi cukup besar dalam kemenangan partai berbasis massa Islam diajang pemilu, desa Sumur kecamatan Brangsong kabupaten Kendal memiliki masyarakat dengan kultur NU yang sangat kuat, para tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda sebagian besar memiliki latar belakang organisasi NU.

PEMILU baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ataupun Pemilihan Calon Legislatif dan DPD serta PILKADA yang dilaksanakan secara langsung merupakan bentuk usaha pemerintah demi berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pemilihan secara langsung juga membawa pengaruh kurang baik terhadap pemilih, terutama pada masyarakat pedesaan.

Melihat kondisi masyarakat pedesaan tersebut, maka strategi politik yang biasa digunakan partai politik dalam PEMILU maupun PILKADA yang menggunakan sistem pemilihan calon kandidat secara langsung adalah menggunakan titik vital dalam masyarakat pedesaan, terutama di Jawa yaitu peran ketokohan NU atau Kiai. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauh mana peran kiai dalam memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan dalam penyuksesan pelaksanaan PILGUB JATENG 2008 di desa Sumur kecamatan Brangsong kabupaten Kendal?, (2) Bagaimanakah interaksi antara kiai dengan tokoh-tokoh politik? Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran kiai dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur JATENG 2008 dan dalam penyuksesan pelaksanaan PILGUB JATENG 2008 di desa Sumur kecamatan Brangsong kabupaten Kendal, (2) Mendeskripsikan interaksi antara kiai dengan tokoh-tokoh politik.

2. Penelitian jurnal ini dituliskan oleh Abdul Haris dan Abdullah Dardum, beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Pada analisisnya sendiri ialah: “KIAI NU DAN POLITIK (KETERLIBATAN KIAI NU JEMBER DALAM KONTESTASI PILPRES 2019). Pada pembahasannya, dimana pada jurnal ini terdapat Pada kontestasi Pilpres 2019, beberapa kiai NU struktural maupun nonstruktural di Jember terlibat aktif dalam memenangkan pasangan calon no urut 1, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Penelitian ini ingin mengungkap makna politik dalam perspektif kiai NU Jember, serta motivasi dan bentuk keterlibatan mereka dalam kontestasi politik praktis (Pilpres 2019). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara operasional penggalian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara mendalam terhadap para informan yang sudah ditetapkan, dan dokumentasi. Data yang didapatkan setelah itu dianalisa melalui dua tahap, yaitu selama proses pengumpulan data

di lapangan dan setelah data tersebut terkumpul dengan langkah; 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Mayoritas kiai NU Jember memaknai politik sebagai perjuangan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Politik juga dimaknai dengan upaya untuk menjaga aqidah umat dari faham atau ideologi yang berseberangan dengan NU. 2) Ada dua motivasi yang mendorong keterlibatan kiai NU Jember dalam politik praktis, yaitu orientasi dakwah dan orientasi ideologis. 3) Bentuk keterlibatan kiai NU dalam politik praktis (Pilpres 2019) di Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan dukungan melalui edaran/maklumat, konsolidasi sesama kiai dan instruksi secara langsung kepada para santri, wali santri, dewan guru/*asatidz*, alumni dan simpatisan pesantren.

3. Pada penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mochamad Iwan Satriawan, Evi Faridaturohmah, beliau mengangkat judul PERAN NU DALAM DEMOKRASI DI DAERAH (STUDI PILKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020). Pembahasan di jurnal tersebut ialah NU mempunyai peran penting dalam proses demokrasi di daerah khususnya dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015-2020 di provinsi Lampung.

Hal ini tidak terlepas dari setiap pilkada NU dalam semua tingkatan selalu disibukkan dengan perhelatan dukung-mendukung calon kepala daerah baik secara terang-terangan yang dilakukan oleh pengurus aktif maupun secara tidak terang-terangan dengan membentuk lembaga diluar struktur resmi NU yaitu KBNU (Keluarga Besar Nahdlatul Ulama).

Fenomena ini tidak dapat dihindari akibat dari tidak tegasnya isi dari khittah 1926 yang hanya mensyaratkan bahwa NU secara kelembagaan netral, namun bagi individu yang

akan berpolitik praktis dipersilahkan. Penulisan ini menemukan fakta bahwa banyak kegiatan-kegiatan NU dalam rangka pemberdayaan masyarakat terabaikan karena pengurus disibukkan dengan politik praktis.

2.2. Kerangka Teori & Konseptual

2.2.1. Konsep Kewibawaan Tradisional

Pada dasarnya kewibawaan tradisional merupakan sebuah bentuk kekuasaan personalistik yang menghimpun melalui peranan masa lampau dan masa kini dari yang mempengaruhi sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai-nilai dan status unggul dari mereka yang punya hubungan ketergantungan yang mapan dengannya.¹

Dalam konsep kewibawaan tradisional, dimana para tokoh tidak perlu melakukan pengancaman, menawarkan imbalan, mencoba mengacu kepada aturan yang mengatur peranan-peranan. Kemudian Tennyson dalam penelitiannya, bahwa kepatuhan adalah ketakziman yang patut diberikan kepada para raja-raja. Ketika berbicara tentang kewibawaan tradisional, dimana perilaku patuh tidak didasari oleh atas persetujuan dengan pendirian ideologi si penguasa.

Akan tetapi, para pengikut taat kepada pendirian sang penguasa tanpa memandang likaliku ideologi yang penuh pertentangan yang mungkin diambilnya. Dalam hal lain, dimana sang penguasa dapat memainkan psikologis para pengikutnya dalam apa yang dilakukannya. Pada hal tersebut, secara fundamental menyatakan bahwa masyarakat tidak peka mengenai hal-hal yang memiliki korelasi dengan politik.

¹ Karl D.Jackson, "Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat" Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti: 1990) Hal. 201.

Kewibawaan Tradisional, pada wujudnya yang murni tidaklah tergantung secara vital [ada imbauan-imbauan ideologi dan kebersamaan. Di lain hal, kewibawaan tradisional tentu berbeda dengan bentuk ketiga kekuasaan yang disebut perampasan. Kewibawaan Tradisional tidak melibatkan hitung-menghitung keuntungan-keuntungan pribadi yang segera oleh si pengikut.

Hubungan kewibawaan tradisional bukanlah sekedar ikatan kesempatan dan kenyamanan, melainkan dipandang sebagai ikatan yang mempertautkan baik pemimpin, maupun pengikut kepada generasi-generasi terdahulu. Ikatan-ikatan kewibawaan tradisional memantapkan korelasi antara individu baik dalam masyarakat tertutup masa lalu, ataupun masyarakat kini yang lebih terbuka.²

Seperti penjelasan sebelumnya mengenai Kewibawaan Tradisional, dimana terdapat sebuah factor utama dalam mempengaruhi masyarakat dalam hal kondisi sosial dan politik. Pada hal ini, Kewibawaan Tradisional secara konsep dapat dibilang hampir sama dengan konsep patronase. Hal ini dikarenakan, kedua jenis tersebut memiliki kesamaan-kesamaan hubungan dari vertical, dwitunggal, asimetris.

Patron maupun Kewibawaan Tradisional yang Berjaya adalah sebuah seseorang yang memantapkan dirinya sebagai perantara yang mutlak diperlukan oleh kelompok yang memiliki beraneka ragam keterampilan yang saling melengkapi.³ Karena hal tersebutlah koalisi-koalisi yang dikerahkan melalui penggunaan kewibawaan tradisional dan patronase mungkin ditandai oleh keaneka-ragaman.

Tokoh patron dan kewibawaan tradisional dapat mengarahkan supaya para konstituennya menyertai suatu organisasi politik maupun menarik mereka keluar dari organisasi itu secara

² Ibid, Hal.203

³ Ibid, Hal.204

patron klien atau kewibawaan tradisional, kesetiaan lebih mengalir kepada pribadi-pribadi ketimbang kepada jabatan-jabatan atau Lembaga-lembaga.

2.2.2. Politik Identitas

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang multicultural. Dimana Indonesia memiliki banyaknya identitas-identitas disetiap daerah, kemudian dari identitas yang dimiliki setiap daerah seringkali menjadi sebuah alat dalam kehidupan di dunia politik. Hal ini tidak luput berdasarkan konsep yang dimiliki oleh Manuel Castells dalam triloginya yaitu *The Power Of Identity* menjelaskan bahwa keberadaan identitas akan terbentuk ketika adanya internalisasi.

Maka asumsi yang dibangun oleh Manuel, identitas berasal dari internalisasi, yang mempengaruhi identitas adalah proses pemaknaan pada aturan yang telah diterapkan oleh suatu institusi.⁴

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik dengan politik identitas.⁵ Pada perbedaan ini dilihat dari identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subyek didalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumber dan sarana politik.⁶

Sementara itu Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai sesuatu kategori politik yang utama. Sedangkan

⁴ M Nurun Najib, "Konstruksi Identitas Keagamaan (Studi tentang pondok pesantren Al-Mukmin ngruki dengan Masyarakat Lokal)", (Thesis tidak diterbitkan, Universitas Indonesia) Hal. 5

⁵ Muhtar Haboddin, "Menggugat Politik Identitas Di Ranah Lokal", Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Brawijaya Vol 3 No 1. (Februari 2012), hal. 4

⁶ M. BASUKI RAHMAT, "Identitas Keagamaan dalam Pemilihan Kepala Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2013" (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2017), Hal. 26

Donald L. Morowitz mendefinisikan politik identitas adalah garis yang tegas untuk menentukan siapa yang diikutsertakan dan siapa saja yang ditolak. Karena garis penentu tersebut sangat nampak tidak dapat dirubah.⁷ Dalam politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem pemisah ketika kekuasaan tidak dapat di taklukan dan pembagian kekuasaan tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisah dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluarnya, kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok spesifik dari ilmu.

Tabel 2.1 Model Politik Identitas

Model	Pola Keterangan	Pola Aksi	Tujuan Gerakan
Pra Modern	Perpecahan obyek (dimana ada perpecahan fundamentalisme pasti ada gerakan sosial yang menyeluruh)	Mobilisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin	Perampasan kekuasaan
Modern	Pendekatan kondisional (keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi)	Keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah	Pembagian kekuasaan

⁷ Ibid, Hal. 27

Post Modern	Gerakan dan dinamikanya sendiri. Proses muncul dari berbagai kesempatan individu. Tidak mendapat suatu perpecahan yang dominan	Kesadaran diri	Otonomi
-------------	--	----------------	---------

Sumber: Muhtar Haboddin 2012; 6

Agama adalah salah satu dasar/basis dari identitas. Dalam pengertian ini agama bersama faktor lainnya seperti bahasa, sejarah bersama dll membentuk suatu identitas dari suatu masyarakat yang membedakan dengan masyarakat yang lain.⁸ Selain itu, agama memiliki doktrin yang kuat terhadap kehidupan social. Hal tersebut dikarenakan, agama mempengaruhi perilaku dalam melakukan beberapa tindakan dan keputusan yang dibuat serta menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Penggunaan politik identitas yang pada dasarnya bersifat pada budaya akan menempati tiga wilayah publik yang menjadi pertarungan diantara banyak kepentingan kultural.⁹

2.2.3. Elite

Teori Elit dalam politik adalah sebuah teori politik yang memandang Elit sebagai aktor politik inti di setiap masyarakat yang terstruktur secara hirarkis. Dengan demikian Elitisme

⁸ Ibid, Hal. 29

⁹ Ahmad Ibrahim Badry, https://www.academia.edu/27766548/Politik_Identitas_sebagai_Modus_Multikulturalisme (diakses pada Sabtu 14 Januari 2017, pukul 20:36 WIB)

(paham tentang adanya kaum elit) berarti cara yang berguna untuk mengidentifikasi dan mempromosikan aneka kondisi yang menguatkan efektivitas Elite.

Selain itu juga, elite merupakan sebuah kelompok perkumpulan orang yang berada di dalam masyarakat dan mereka memiliki pengaruh yang besar untuk masyarakat. Sementara itu, dalam hal sosiologis dan politis elite merupakan *the rulling class*.¹⁰ Hal itu dikarenakan, terdapat sebuah golongan yang mampu menjadi pemegang kekuasaan baik itu formal maupun informal dalam strata social. Kemudian pada dasarnya elite tercipta dikarenakan mereka memiliki pengaruh yang besar suatu wilayah serta memiliki hubungan erat kepada setiap wilayah yang ada di dekat wilayahnya.

Sedangkan elite politik sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu elite politik local dan elite politik non local. Pada elite politik local sendiri, dimana mereka merupakan sebuah orang yang memiliki sebuah jabatan politik seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPR maupun Anggota DPRD. Sedangkan pada elite politik non local, dimana mereka merupakan suatu orang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap lingkup masyarakat dimana hal ini terdiri dari para Ulama, Ormas (Organisasi Masyarakat), Kepemudaan, dll.¹¹

Kemudian dalam sirkulasi elite, konflik seringkali terjadi dari dalam internal kelompok maupun dari eksternal para kelompok pengusaha ataupun kelompok tandingan lainnya. Sementara itu, menurut Pareto dalam sirkulasi elite terdapat dua bagian. Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya.¹²

¹⁰ MOHAMMAD SYAFI'IE, "PERAN ELITE POLITIK DALAM PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SUMENEP" (UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,2017), Hal.28

¹¹ S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, Hal. 203

¹² Ibid, Hal.29

Pada definisi elite politik lainnya, terdapat perspektif dari Karl Marx tentang elite politik. Dimana beliau menyatakan bahwa elite politik terbagi menjadi tiga macam, yang dimana diantaranya sebagai berikut:

- a. **Metode Posisi**, dimana elite politik merupakan mereka yang memiliki sebuah kekuasaan atau jabatan politik.
- b. **Metode Reputasi**, dimana elite politik disini mampu untuk menjadi problem solving dengan cara merumuskan sebuah kebijakan demi kemaslahatan masyarakat.
- c. **Metode Pengaruh**, pada hal ini dimana elite politik menjadi kunci dalam perihal mempengaruhi berbagai tingkatan kekuasaan.

Di lain hal, menurut Keller elite pada awalnya merupakan sebuah perantara untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan¹³.

Sementara itu, Pareto menjelaskan kedudukan elite dalam masyarakat berada pada tingkatan yang berbeda. Dimulai dari Governing Elite, Non Governing Elite, dan Non Elite. Selain itu juga, Pareto menjelaskan tentang konsep pergantian elite. Pada konsepnya beliau mengemukakan jenis pergantian elite sebagai berikut: pergantian elite diantara kelompok-kelompok yang memerintah dan pergantian elite dengan penduduk lainnya.

Pareto dan Mosca juga mengutarakan bahwa elite sebagai penguasa merupakan sebuah upaya yang konkret dalam memonopoli pos-pos kunci di lingkup masyarakat. Hal ini juga

¹³ Ibid, Hal.31

dapat di support dengan teorinya Robert Michel yang menjelaskan tentang “Hukum Besi Oligarki”. Karena sebuah sistem dapat berjalan lancar apabila terdapat kelompok yang mampu menjadi patron atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, Mosca menganggap bahwa semua klasifikasi sistem pemerintahan seperti Aristokrasi, Demokrasi, atau lainnya. Merupakan sistem yang tidak bisa mensejahterahkan masyarakat dan menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite. Namun, secara rasionalnya teori elite yang dikemukakan oleh Mosca dan Pareto sebenarnya tidak lagi relevan.

Hal tersebut disebabkan karena apabila sistem kuasa hanya dapat berlaku untuk para elite saja, maka akan terjadinya sebuah simpang siur atau ketimpangan bagi seluruh aspek masyarakat. Dilain hal juga, apabila kekuasaan hanya berada di tangan para elite saja maka kelompok elite tersebut akan semakin leluasa untuk memonopoli seluruh kepentingannya ketimbang memikirkan kemaslahatan seluruh masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini, dimana penulis menggunakan teori Lokal Strongman, Politik Identitas, dan Elite. Dari ketiga teori tersebut penulis melihat bahwa dari judul penelitian yang diangkat memiliki sebuah kaitan dari ketiga teori tersebut. Judul penulis sendiri ialah: **PERAN KYAI NAHDLATUL ULAMA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 STUDY KASUS: “PEMENANGAN ADE YASIN DAN IWAN SETIAWAN (HADIST)”**

Dari judul tersebut, dimana terdapat dua Variabel yaitu: Peran Kyai NU dan Pemenangan pasangan Hadist. Kemudian dari kedua variable tersebut terdapat sebuah korelasi dari ketiga teori yang penulis pakai. Pada teori Identitas, dimana setiap manusia memiliki

identitasnya masing-masing dan dalam konteks negara sendiri memiliki identitasnya juga. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multiculturalism, kemudian juga Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam.

Dari hal tersebut, dapat kita kaitkan bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam akan menjadi sebuah identitas negara. Oleh karena itu, teori identitas ini sangat berkaitan dengan para kyai-kyai atau para alim ulama. Sedangkan apabila kita kaitkan dengan teori elite, secara hariahnya elite merupakan suatu individu maupun kelompok yang memiliki power kekuasaan ataupun pengaruh pada lingkup masyarakat.

Pada teorinya elite terbagi menjadi dua bagian, yaitu elite politik dan elite non politik. Pada elite politik sendiri merupakan suatu individu maupun kelompok yang memiliki jabatan politik. Seperti: ketua Partai Politik, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, DPRD. Sedangkan apabila elite non politik, merupakan suatu individu maupun kelompok yang memiliki pengaruh terhadap tatanan masyarakat tetapi dia tidak memiliki jabatan politik di tatanan masyarakat tersebut. Individu atau kelompok elite non politik terdiri dari: alih agama, ormas, pemuda, maupun orang yang memiliki pemikiran yang luwes dari lingkup masyarakat tersebut.

Maka dari itu dari variable yang penulis ambil, secara kaitannya dengan teori sangatlah jelas. Dimulai dari teori identitas yang memunculkan identitas negara Indonesia ini merupakan negara yang mayoritas pemeluk agama islam terbesar didunia. Kemudian dari identitas tersebut memunculkan kelompok elite non politik di setiap lingkup masyarakat yaitu Alim Ulama. Dari alim ulama ini, maka akan memunculkannya sebagai local strongman diwilayah tersebut.

Berikut di Bawah ini merupakan Gambar Kerangka Pemikiran penelitian penulis:

